

PEMBANGUNAN IKN DAN PERGESERAN DISTRIBUSI KEKUASAAN EKONOMI DI INDONESIA: PERSPEKTIF KERUANGAN DAN SISTEM SOSIAL

Kartini¹, Novi Zaini², Mujiati³, Gusmal Hendra⁴, Halimatul Mahmudah⁵, Sumanti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Magister Pendidikan Dasar, Universitas Adzkia, Padang, Indonesia

¹kartiniramli84@gmail.com, ²novizaini28@gmail.com,

³mujiati.a.ma@gmail.com, ⁴gusmalhendra34@gmail.com,

⁵halimatul1988@gmail.com, ⁶sumanti@adzkia.ac.id

ABSTRACT

The development of Nusantara Capital City (IKN) is a strategic policy aimed at reducing the concentration of development in Java and promoting more balanced regional development in Indonesia. This study analyzes IKN development in the context of shifting economic power distribution from spatial and social system perspectives. The research employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected from scholarly articles, books, research reports, and policy documents and analyzed through content analysis. The findings indicate that IKN has the potential to establish a new growth center in East Kalimantan through increased investment, infrastructure development, and stronger regional connectivity. These developments may encourage the redistribution of economic activities that have long been concentrated in Java. From a social perspective, IKN development generates changes in population mobility, urbanization, livelihood structures, and interactions between local communities and newcomers. The project also presents challenges related to socio-spatial inequality, changing land control patterns, and the need for inclusive governance. The study concludes that IKN functions as an instrument of spatial transformation with implications for the distribution of economic power and social systems in Indonesia.

Keywords: Nusantara Capital City, economic power distribution, regional development, social transformation, spatial inequality.

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kebijakan strategis yang diarahkan untuk mengurangi konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa dan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembangunan IKN dalam konteks pergeseran distribusi kekuasaan ekonomi di Indonesia melalui perspektif keruangan dan sistem sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN berpotensi membentuk pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur melalui

peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan konektivitas wilayah. Kondisi tersebut dapat mendorong redistribusi aktivitas ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari perspektif sosial, pembangunan IKN memunculkan perubahan berupa mobilitas penduduk, urbanisasi, perubahan mata pencaharian, dan dinamika hubungan antara masyarakat lokal dengan pendatang. Pembangunan IKN juga menghadirkan tantangan berupa potensi ketimpangan sosial-spasial, perubahan penguasaan ruang, dan kebutuhan akan tata kelola pembangunan yang inklusif. Kajian ini menunjukkan bahwa IKN merupakan instrumen transformasi ruang yang berimplikasi pada perubahan distribusi kekuasaan ekonomi dan sistem sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara, distribusi kekuasaan ekonomi, pembangunan wilayah, transformasi sosial, ketimpangan spasial.

A. Pendahuluan

Pembangunan wilayah di Indonesia selama beberapa dekade menunjukkan kecenderungan konsentrasi aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu, terutama Pulau Jawa. Kondisi ini tercermin dari dominasi Jawa dalam aktivitas industri, perdagangan, jasa, dan investasi nasional. Firman (2022) menjelaskan bahwa perkembangan metropolitan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki akses infrastruktur dan konektivitas yang lebih baik. Firman et al. (2023) menunjukkan bahwa urbanisasi yang berlangsung dalam jangka panjang turut memperkuat ketimpangan spasial antarwilayah. Menurut Storper (2022), konsentrasi aktivitas ekonomi pada pusat-pusat tertentu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi distribusi pembangunan regional.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi isu yang terus dibahas dalam kajian pembangunan regional. Iammarino et al. (2023) menjelaskan bahwa perbedaan kapasitas ekonomi antarwilayah dapat

menghasilkan disparitas dalam akses terhadap investasi, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Rodríguez-Pose (2022) menunjukkan bahwa wilayah yang berada di luar pusat pertumbuhan sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh manfaat pembangunan. Dannenberg dan Kulke (2022) mengemukakan bahwa negara berkembang menghadapi tantangan dalam mendistribusikan aktivitas ekonomi secara lebih seimbang di antara berbagai wilayahnya.

Dominasi Pulau Jawa dalam struktur ekonomi nasional juga berkaitan dengan posisinya sebagai pusat pemerintahan dan pengambilan keputusan. Hudalah et al. (2021) menjelaskan bahwa hubungan antara perencanaan wilayah dan kekuasaan memiliki peran dalam membentuk pola pembangunan perkotaan di Indonesia. Silver (2021) menunjukkan bahwa proyek pembangunan berskala besar sering kali berkaitan dengan strategi negara dalam mengarahkan distribusi sumber daya. Firman (2022) mengemukakan bahwa konsentrasi fungsi politik dan ekonomi pada satu

wilayah dapat memperkuat ketimpangan spasial dalam jangka panjang.

Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai upaya untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Pike et al. (2023) menjelaskan bahwa pembangunan regional pada era transformasi ekonomi memerlukan pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antarwilayah. Capello dan Cerisola (2022) mengemukakan bahwa kohesi teritorial menjadi salah satu tujuan dalam kebijakan pembangunan regional modern. Lang dan Görmar (2023) menunjukkan bahwa wilayah periferal memerlukan dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan keterhubungan dengan pusat-pusat ekonomi utama.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu kebijakan strategis yang diarahkan untuk mendukung transformasi struktur ruang nasional. Kalalinggi et al. (2023) menjelaskan bahwa pembangunan IKN dirancang sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia. Anirwan et al. (2024) menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota baru memiliki dimensi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang saling berkaitan. Moser (2022) mengemukakan bahwa pembangunan ibu kota baru di negara-negara Global South sering dikaitkan dengan upaya membentuk arah pembangunan nasional yang baru.

Pemindahan ibu kota negara juga dapat dipahami sebagai bentuk

rekayasa keruangan yang bertujuan mengubah distribusi aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Menurut Moser (2022), pembangunan ibu kota baru sering digunakan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar wilayah yang telah mengalami konsentrasi pembangunan. Kalalinggi et al. (2023) menjelaskan bahwa IKN diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan antarpulau. Firman et al. (2023) menunjukkan bahwa perubahan pusat aktivitas ekonomi berpotensi memengaruhi struktur spasial nasional dalam jangka panjang.

Perspektif keruangan menempatkan IKN sebagai bagian dari strategi pembentukan *growth pole* baru di Indonesia. Faoziyah et al. (2025) menjelaskan bahwa perkembangan pusat pertumbuhan memiliki pengaruh terhadap pola urbanisasi dan distribusi aktivitas ekonomi. Storper (2022) menunjukkan bahwa pembangunan wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu kawasan menarik investasi, tenaga kerja, dan inovasi. Turok dan McCann (2023) mengemukakan bahwa proses aglomerasi ekonomi dapat menghasilkan pusat-pusat pertumbuhan baru apabila didukung oleh konektivitas dan infrastruktur yang memadai.

Pembangunan IKN juga berkaitan dengan upaya mengurangi pola hubungan *core-periphery* yang selama ini menempatkan Jawa sebagai wilayah inti pembangunan nasional. Lang dan Görmar (2023) menjelaskan bahwa penguatan wilayah periferal memerlukan

intervensi kebijakan yang mampu meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dijkstra et al. (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan regional sering berkaitan dengan perbedaan kapasitas pembangunan antarwilayah. Iammarino et al. (2023) mengemukakan bahwa distribusi investasi dan aktivitas ekonomi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan regional.

Selain dimensi ekonomi, pembangunan IKN memiliki implikasi terhadap sistem sosial masyarakat. Rachmawati et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan Nusantara berpotensi menghasilkan dinamika antara kohesi sosial dan polarisasi sosial. Gunawan (2024) menunjukkan bahwa keberagaman etnis di wilayah sekitar IKN memerlukan perhatian dalam proses pembangunan. Muafiroh dan Tambunan (2025) mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi salah satu aspek yang memengaruhi keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.

Transformasi sosial juga dapat muncul melalui perubahan pola migrasi, urbanisasi, dan struktur mata pencaharian masyarakat lokal. Rijanta et al. (2025) menjelaskan bahwa pembangunan IKN berpotensi memengaruhi pola penguasaan ruang dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur. Olijkan (2023) menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki berbagai persepsi terhadap proses pemindahan ibu kota. Rozi et al. (2025) mengemukakan bahwa pengalaman relokasi ibu kota di berbagai negara menunjukkan

adanya perubahan sosial yang menyertai pembangunan pusat pemerintahan baru.

Pembangunan IKN juga menghadirkan berbagai isu yang berkaitan dengan tata kelola, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Rahayu et al. (2025) menunjukkan bahwa aspek lingkungan menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan Nusantara. Fisher et al. (2024) menjelaskan adanya dilema antara agenda pembangunan hijau dan kebutuhan pembangunan fisik berskala besar. Mardianti et al. (2025) mengemukakan bahwa pendekatan kolaboratif dalam tata kelola dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek pembangunan berskala besar.

Perubahan struktur ruang, distribusi aktivitas ekonomi, dan transformasi sistem sosial yang menyertai pembangunan IKN menjadikan isu ini relevan untuk dikaji dari perspektif keruangan dan sosial. Istiqomah et al. (2025) menunjukkan bahwa pembangunan Nusantara telah memunculkan berbagai bentuk transformasi spasial pada kawasan sekitarnya. Hudalah et al. (2021) menjelaskan bahwa distribusi kekuasaan dalam pembangunan memiliki pengaruh terhadap arah perubahan wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan IKN dapat dipahami sebagai upaya negara untuk mendorong pergeseran distribusi kekuasaan ekonomi sekaligus membentuk konfigurasi ruang dan sistem sosial baru dalam konteks pembangunan nasional Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai fenomena pembangunan yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan ekonomi, transformasi keruangan, dan perubahan sistem sosial di Indonesia. Studi pustaka memungkinkan peneliti menganalisis berbagai konsep, teori, dan temuan empiris yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara pembangunan IKN dan perubahan struktur pembangunan nasional.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan pembangunan IKN, pembangunan wilayah, ekonomi politik, ketimpangan regional, serta transformasi sosial. Literatur yang digunakan terutama berasal dari publikasi nasional dan internasional yang terbit pada periode 2021–2025 guna memperoleh gambaran yang sesuai dengan perkembangan terkini mengenai pembangunan IKN dan implikasinya terhadap struktur ruang serta sistem sosial masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan telaah literatur berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Literatur yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu distribusi

kekuasaan ekonomi, pembangunan pusat pertumbuhan (*growth pole*), ketimpangan wilayah, transformasi sosial, dan pembangunan IKN. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, keterbaruan publikasi, dan kesesuaian substansi dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi temuan, dan sintesis berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Analisis difokuskan pada bagaimana pembangunan IKN berpotensi memengaruhi distribusi kekuasaan ekonomi nasional, perubahan struktur keruangan Indonesia, serta transformasi sistem sosial masyarakat di kawasan IKN dan wilayah sekitarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi di Indonesia Sebelum Pembangunan IKN

Konsentrasi kekuasaan ekonomi merupakan salah satu karakteristik utama pembangunan Indonesia sebelum pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Aktivitas ekonomi nasional selama beberapa dekade terkonsentrasi pada Pulau Jawa yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, dan jasa. Firman (2022) menjelaskan bahwa transformasi metropolitan di Indonesia memperlihatkan kecenderungan penguatan aktivitas

ekonomi pada wilayah-wilayah perkotaan utama di Jawa. Hudalah et al. (2021) menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan dan kekuasaan memiliki peran dalam membentuk distribusi pembangunan perkotaan. Menurut Firman et al. (2023), proses urbanisasi yang berlangsung dalam jangka panjang turut memperkuat konsentrasi aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu.

Dominasi Pulau Jawa terlihat dari posisinya sebagai pusat produksi dan aktivitas ekonomi nasional. Dannenberg dan Kulke (2022) menjelaskan bahwa wilayah yang memiliki keunggulan infrastruktur dan akses pasar cenderung berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Storper (2022) mengemukakan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi merupakan konsekuensi dari proses aglomerasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Firman et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan dominasi wilayah perkotaan besar di Pulau Jawa.

Konsentrasi produk domestik regional bruto pada sejumlah wilayah di Jawa mencerminkan ketimpangan distribusi aktivitas ekonomi antardaerah. Iammarino et al. (2023) menjelaskan bahwa ketimpangan regional sering muncul akibat perbedaan kapasitas produksi, investasi, dan akses terhadap sumber daya pembangunan. Rodríguez-Pose (2022) menunjukkan bahwa wilayah yang berada di luar pusat pertumbuhan sering menghadapi

keterbatasan dalam memperoleh manfaat ekonomi yang setara. Pike et al. (2023) mengemukakan bahwa distribusi pembangunan yang tidak merata dapat memengaruhi dinamika pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.

Dominasi Jawa juga tercermin pada konsentrasi investasi nasional. Aktivitas investasi cenderung mengarah pada wilayah yang telah memiliki infrastruktur, pasar, dan jaringan ekonomi yang berkembang. Turok dan McCann (2023) menjelaskan bahwa investasi memiliki kecenderungan terkonsentrasi pada kawasan yang menawarkan keuntungan aglomerasi ekonomi. Capello dan Cerisola (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan wilayah sering kali dipengaruhi oleh distribusi investasi yang tidak merata. Firman (2022) mengemukakan bahwa kawasan metropolitan di Jawa menjadi tujuan utama berbagai aktivitas ekonomi berskala besar.

Konsentrasi investasi tersebut berkontribusi terhadap perkembangan sektor industri dan jasa pada wilayah tertentu. Dannenberg dan Kulke (2022) menjelaskan bahwa sektor industri cenderung berkembang pada wilayah yang memiliki akses logistik dan konektivitas yang baik. Firman et al. (2023) menunjukkan bahwa kawasan perkotaan besar menjadi pusat perkembangan sektor jasa modern di Indonesia. Storper (2022) mengemukakan bahwa aglomerasi ekonomi menghasilkan keterkaitan yang kuat antara investasi, industri, dan pertumbuhan wilayah.

Jakarta memiliki posisi sentral dalam struktur kekuasaan ekonomi Indonesia sebelum pembangunan IKN. Sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi pusat pengambilan keputusan politik sekaligus pusat aktivitas ekonomi nasional. Hudalah et al. (2021) menjelaskan bahwa perencanaan perkotaan di Indonesia memiliki keterkaitan dengan konsentrasi kekuasaan negara pada wilayah tertentu. Silver (2021) menunjukkan bahwa proyek pembangunan dan kebijakan strategis sering kali terkonsentrasi pada kota-kota yang memiliki fungsi politik dominan. Firman (2022) mengemukakan bahwa posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan memperkuat perannya dalam sistem ekonomi nasional.

Sentralisasi pemerintahan di Jakarta berpengaruh terhadap distribusi sumber daya pembangunan. Moser (2022) menjelaskan bahwa ibu kota negara memiliki fungsi simbolik sekaligus strategis dalam mengarahkan pembangunan nasional. Hudalah et al. (2021) menunjukkan bahwa lokasi pusat pemerintahan berpengaruh terhadap distribusi investasi publik dan infrastruktur. Silver (2021) mengemukakan bahwa hubungan antara kekuasaan politik dan pembangunan perkotaan menjadi karakteristik yang umum ditemukan pada proyek pembangunan negara di Asia Tenggara.

Selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta juga berkembang sebagai pusat korporasi dan aktivitas bisnis nasional. Firman

et al. (2023) menjelaskan bahwa konsentrasi perusahaan besar pada satu wilayah dapat memperkuat dominasi ekonomi kawasan tersebut. Storper (2022) menunjukkan bahwa pusat-pusat ekonomi cenderung menarik akumulasi modal dan aktivitas bisnis dalam jumlah besar. Turok dan McCann (2023) mengemukakan bahwa keberadaan perusahaan, lembaga keuangan, dan jaringan bisnis menjadi faktor yang memperkuat proses aglomerasi ekonomi.

Konsentrasi infrastruktur menjadi faktor lain yang memperkuat dominasi Jakarta dan Pulau Jawa. Capello dan Cerisola (2022) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki hubungan erat dengan peningkatan daya tarik investasi suatu wilayah. Dijkstra et al. (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan regional sering berkaitan dengan perbedaan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas antarwilayah. Firman (2022) mengemukakan bahwa pembangunan jaringan transportasi dan layanan publik yang terkonsentrasi pada kawasan tertentu dapat memperkuat ketimpangan spasial.

Kondisi tersebut menghasilkan perbedaan tingkat pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Lang dan Görmär (2023) menjelaskan bahwa wilayah periferi sering menghadapi keterbatasan akses terhadap investasi dan peluang ekonomi. Rodríguez-Pose (2022) menunjukkan bahwa wilayah yang dianggap berada di luar pusat

pembangunan sering mengalami keterlambatan dalam proses transformasi ekonomi. Iammarino et al. (2023) mengemukakan bahwa ketimpangan regional merupakan fenomena yang banyak ditemukan pada negara dengan konsentrasi pembangunan yang tinggi.

Perbedaan akses pembangunan juga terlihat pada distribusi infrastruktur, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi. Pike et al. (2023) menjelaskan bahwa pembangunan regional memerlukan perhatian terhadap distribusi sumber daya antarwilayah. Dannenberg dan Kulke (2022) menunjukkan bahwa keterhubungan wilayah menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan daerah dalam menarik investasi dan aktivitas ekonomi. Dijkstra et al. (2023) mengemukakan bahwa kesenjangan akses pembangunan dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pada berbagai wilayah.

Ketimpangan ekonomi regional sebelum pembangunan IKN menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara proporsional antarwilayah. Firman et al. (2023) menjelaskan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi dapat memperbesar perbedaan perkembangan antarwilayah. Rodríguez-Pose (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan regional berpotensi memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Capello dan Cerisola (2022) mengemukakan bahwa kohesi teritorial menjadi salah

satu tantangan dalam pembangunan wilayah modern.

Kondisi konsentrasi kekuasaan ekonomi, dominasi Pulau Jawa, sentralisasi pemerintahan di Jakarta, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi konteks yang melatarbelakangi pembangunan IKN. Moser (2022) menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota baru sering digunakan sebagai instrumen untuk membentuk konfigurasi ruang nasional yang berbeda. Kalalinggi et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan Nusantara diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan transformasi wilayah. Anirwan et al. (2024) mengemukakan bahwa pemindahan ibu kota merupakan bagian dari strategi pembangunan yang memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keruangan terhadap masa depan Indonesia.

Pembangunan IKN dan Pergeseran Distribusi Kekuasaan Ekonomi

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dipahami sebagai upaya negara membentuk pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Perspektif *growth pole* menjelaskan bahwa pembangunan yang terpusat pada suatu kawasan dapat menghasilkan efek penyebaran ekonomi ke wilayah sekitarnya (Faoziyah et al., 2025). Pike et al. (2023) mengemukakan bahwa pusat pertumbuhan berfungsi sebagai penggerak transformasi ekonomi regional melalui investasi dan pembangunan infrastruktur. Menurut Kalalinggi et al. (2023), pembangunan

IKN dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas nasional.

Posisi IKN di Kalimantan Timur memberikan dimensi keruangan yang berbeda dibandingkan pola pembangunan Indonesia sebelumnya yang terkonsentrasi di Jawa. Dannenberg dan Kulke (2022) menjelaskan bahwa lokasi strategis suatu wilayah memengaruhi kemampuannya menarik aktivitas ekonomi baru. Storper (2022) menunjukkan bahwa pembentukan pusat pertumbuhan baru memerlukan dukungan infrastruktur, kelembagaan, dan investasi yang berkelanjutan. Anirwan et al. (2024) mengemukakan bahwa pembangunan IKN diarahkan untuk menciptakan pusat administrasi sekaligus pusat aktivitas ekonomi baru.

Investasi menjadi instrumen utama dalam proses pembentukan IKN sebagai pusat pertumbuhan. Turok dan McCann (2023) menjelaskan bahwa arus investasi memiliki peran dalam mempercepat proses aglomerasi ekonomi pada suatu wilayah. Kalalinggi et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan Nusantara memerlukan dukungan investasi publik dan swasta dalam berbagai sektor. Rachmawati et al. (2023) menjelaskan bahwa pengembangan konsep *smart city* di IKN juga membutuhkan integrasi investasi pada infrastruktur digital dan layanan perkotaan.

Pembangunan infrastruktur menjadi faktor yang menentukan kemampuan IKN dalam menarik aktivitas ekonomi baru. Capello dan

Cerisola (2022) menjelaskan bahwa kualitas infrastruktur berpengaruh terhadap konektivitas dan produktivitas wilayah. Firman (2022) menunjukkan bahwa perkembangan pusat-pusat ekonomi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan jaringan transportasi dan layanan publik. Istiqomah et al. (2025) mencatat bahwa pembangunan Nusantara telah mendorong transformasi spasial yang memengaruhi struktur ruang kawasan sekitarnya.

Efek pengganda ekonomi (*multiplier effect*) menjadi salah satu argumen utama dalam pembangunan IKN. Pike et al. (2023) menjelaskan bahwa investasi pada pusat pertumbuhan dapat menciptakan aktivitas ekonomi turunan melalui peningkatan permintaan barang, jasa, dan tenaga kerja. Turok dan McCann (2023) mengemukakan bahwa aglomerasi ekonomi menghasilkan keterkaitan antaraktivitas ekonomi yang dapat memperluas dampak pembangunan. Kalalinggi et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan IKN diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui pengembangan sektor konstruksi, jasa, dan perdagangan.

Pembangunan IKN juga berpotensi mengubah arah distribusi investasi nasional yang sebelumnya lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Firman et al. (2023) menjelaskan bahwa konsentrasi investasi merupakan salah satu faktor yang memperkuat ketimpangan spasial di Indonesia. Menurut Rodríguez-Pose (2022), redistribusi investasi dapat

meningkatkan kapasitas wilayah yang selama ini berada di luar pusat pertumbuhan utama. Anirwan et al. (2024) mengemukakan bahwa IKN memiliki potensi menjadi magnet investasi baru di kawasan timur Indonesia.

Redistribusi investasi tersebut membuka peluang bagi Kalimantan untuk memperoleh posisi yang lebih strategis dalam perekonomian nasional. Lang dan Görmär (2023) menjelaskan bahwa wilayah perifer dapat mengalami transformasi apabila memperoleh dukungan investasi dan konektivitas yang memadai. Dijkstra et al. (2023) menunjukkan bahwa pembangunan pada wilayah di luar pusat ekonomi tradisional dapat mengurangi kesenjangan pembangunan regional. Kalalinggi et al. (2023) menilai bahwa IKN memiliki potensi memperkuat peran Kalimantan dalam struktur ekonomi Indonesia.

Dampak pembangunan IKN juga dapat dirasakan oleh kawasan Indonesia Timur melalui peningkatan konektivitas dan integrasi ekonomi. Capello dan Cerisola (2022) menjelaskan bahwa pembangunan pusat pertumbuhan dapat memperkuat hubungan ekonomi antardaerah. Faoziyah et al. (2025) menunjukkan bahwa perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru berpotensi memengaruhi distribusi urbanisasi dan aktivitas ekonomi nasional. Menurut Firman (2022), konektivitas antarkawasan menjadi faktor penting dalam menciptakan penyebaran manfaat pembangunan.

Integrasi kawasan sekitar IKN menjadi aspek yang menentukan efektivitas pembangunan sebagai instrumen pemerataan wilayah. Dannenberg dan Kulke (2022) menjelaskan bahwa keterhubungan antara pusat pertumbuhan dan wilayah sekitarnya memengaruhi distribusi manfaat ekonomi. Istiqomah et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi spasial di kawasan Nusantara telah memunculkan perubahan fungsi ruang dan jaringan aktivitas ekonomi. Rachmawati et al. (2023) mengemukakan bahwa kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan integrasi kawasan.

Pembangunan IKN berpotensi menghasilkan pergeseran struktur ruang nasional dari pola yang berpusat pada Jawa menuju konfigurasi yang lebih tersebar. Moser (2022) menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota baru sering digunakan sebagai instrumen untuk membentuk orientasi pembangunan nasional yang berbeda. Firman et al. (2023) menunjukkan bahwa distribusi aktivitas ekonomi memiliki hubungan erat dengan struktur jaringan perkotaan nasional. Storper (2022) mengemukakan bahwa perubahan pusat aktivitas ekonomi dapat memengaruhi hubungan antarwilayah dalam jangka panjang.

Perubahan tersebut berpotensi memunculkan koridor ekonomi baru yang menghubungkan Jawa, Kalimantan, dan kawasan timur Indonesia. Pike et al. (2023) menjelaskan bahwa koridor ekonomi

berfungsi memperkuat arus investasi, perdagangan, dan mobilitas manusia. Turok dan McCann (2023) menunjukkan bahwa konektivitas antarpusat pertumbuhan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang lebih inklusif. Kalalinggi et al. (2023) mengemukakan bahwa pembangunan Nusantara diarahkan untuk memperkuat integrasi wilayah dalam skala nasional.

Pergeseran distribusi kekuasaan ekonomi juga berkaitan dengan meningkatnya peran negara dalam mengarahkan pembangunan wilayah. Hudalah et al. (2021) menjelaskan bahwa perencanaan ruang merupakan instrumen yang digunakan negara untuk memengaruhi distribusi sumber daya dan aktivitas ekonomi. Silver (2021) menunjukkan bahwa proyek perkotaan berskala besar sering mencerminkan strategi negara dalam membentuk struktur pembangunan baru. Moser (2022) mengemukakan bahwa pembangunan ibu kota baru memiliki dimensi ekonomi politik yang berkaitan dengan redistribusi kekuasaan dan sumber daya.

Meskipun diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, IKN juga memiliki potensi membentuk konsentrasi modal baru pada kawasan tertentu. Iammarino et al. (2023) menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan dapat menghasilkan ketimpangan baru apabila manfaat pembangunan terkonsentrasi pada wilayah inti. Rachmawati et al. (2025) menunjukkan bahwa pembangunan

Nusantara menghadirkan dinamika antara kohesi sosial dan potensi polarisasi sosial. Muafiroh dan Tambunan (2025) mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dan tata kelola pembangunan menjadi faktor yang memengaruhi distribusi manfaat ekonomi di kawasan IKN.

Dampak Sosial dan Transformasi Sistem Sosial

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur ruang dan distribusi aktivitas ekonomi, tetapi juga memunculkan transformasi pada sistem sosial masyarakat. Perubahan tersebut berlangsung melalui mobilitas penduduk, urbanisasi, perubahan struktur pekerjaan, dan interaksi sosial antara kelompok masyarakat yang berbeda. Moser (2022) menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota baru umumnya diikuti oleh perubahan konfigurasi sosial yang memengaruhi hubungan antara negara, masyarakat, dan ruang. Anirwan et al. (2024) menunjukkan bahwa pembangunan IKN memiliki dimensi sosial yang sama pentingnya dengan aspek ekonomi dan fisik pembangunan. Menurut Rachmawati et al. (2025), transformasi sosial menjadi salah satu konsekuensi yang melekat pada proses pembangunan Nusantara.

Mobilitas penduduk menjadi salah satu dampak sosial yang paling terlihat dalam pembangunan IKN. Perpindahan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung pemerintahan akan meningkatkan arus migrasi menuju Kalimantan

Timur. Kalalinggi et al. (2023) menjelaskan bahwa perkembangan IKN diproyeksikan meningkatkan aktivitas penduduk dan kebutuhan layanan perkotaan. Rozi et al. (2025) menunjukkan bahwa relokasi ibu kota di berbagai negara umumnya diikuti oleh perpindahan penduduk dalam skala besar. Olijkan (2023) mencatat bahwa masyarakat di kawasan Sepaku telah mulai merasakan perubahan akibat meningkatnya mobilitas manusia menuju wilayah IKN.

Arus migrasi juga berkaitan dengan perpindahan tenaga kerja dari berbagai daerah ke kawasan pembangunan ibu kota baru. Rijanta et al. (2025) menjelaskan bahwa proses urbanisasi di Kalimantan Timur telah mendorong perubahan struktur pekerjaan dan penggunaan lahan. Dannenberg dan Kulke (2022) menunjukkan bahwa pembangunan pusat pertumbuhan baru cenderung menarik tenaga kerja karena meningkatnya permintaan terhadap berbagai sektor ekonomi. Menurut Pike et al. (2023), mobilitas tenaga kerja merupakan bagian dari proses transformasi ekonomi regional yang berlangsung pada wilayah berkembang.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi konsekuensi logis dari perpindahan ASN, pekerja konstruksi, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat lainnya ke kawasan IKN. Turok dan McCann (2023) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk sering mengikuti perkembangan pusat aglomerasi ekonomi baru. Faoziyah et al. (2025)

menunjukkan bahwa pertumbuhan pusat-pusat perkotaan di Indonesia memiliki hubungan erat dengan peningkatan urbanisasi. Kalalinggi et al. (2023) mengemukakan bahwa pembangunan Nusantara diperkirakan akan mempercepat perkembangan kawasan perkotaan baru di Kalimantan Timur.

Transformasi sosial juga terlihat melalui interaksi antara pendatang dan masyarakat lokal. Rachmawati et al. (2025) menjelaskan bahwa keberagaman sosial yang meningkat dapat menghasilkan kohesi sosial maupun polarisasi sosial. Gunawan (2024) menunjukkan bahwa karakteristik etnis di wilayah sekitar IKN memerlukan perhatian dalam pengelolaan hubungan sosial masyarakat. Muafiroh dan Tambunan (2025) mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor yang memengaruhi kualitas interaksi sosial dalam pembangunan ibu kota baru.

Perubahan struktur sosial masyarakat lokal berlangsung seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan investasi. Olijkan (2023) menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lokal menghadapi ketidakpastian mengenai perubahan yang akan terjadi di lingkungan mereka. Rijanta et al. (2025) menjelaskan bahwa proses urbanisasi perbatasan (*frontier urbanisation*) dapat mengubah pola relasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Prabowo dan Wiratama (2025) mengemukakan bahwa pengelolaan dampak sosial menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial

selama proses pembangunan berlangsung.

Pembangunan IKN juga berpengaruh terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat. Rijanta et al. (2025) menunjukkan adanya pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor tradisional menuju sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi. Pike et al. (2023) menjelaskan bahwa transformasi ekonomi regional sering diikuti oleh perubahan struktur pekerjaan masyarakat. Menurut Firman (2022), perkembangan pusat-pusat ekonomi baru cenderung menciptakan kebutuhan tenaga kerja dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan kondisi sebelumnya.

Transformasi sosial budaya menjadi bagian lain yang muncul dalam proses pembangunan ibu kota baru. Moser (2022) menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota memiliki dimensi simbolik yang berkaitan dengan pembentukan identitas nasional. Santoso dan Alamsyah (2025) menunjukkan bahwa diskursus publik mengenai Nusantara berkembang melalui berbagai media digital dan ruang sosial virtual. Rachmawati et al. (2025) mengemukakan bahwa perubahan komposisi penduduk berpotensi memengaruhi pola interaksi budaya pada kawasan IKN.

Peluang pembangunan yang muncul di kawasan IKN juga disertai kemungkinan terbentuknya ketimpangan baru. Rodríguez-Pose (2022) menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan dapat menghasilkan kelompok wilayah yang memperoleh manfaat pembangunan dalam tingkat

yang berbeda. Iammarino et al. (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan regional sering muncul ketika distribusi investasi dan kesempatan ekonomi tidak berlangsung merata. Lang dan Görmär (2023) mengemukakan bahwa wilayah periferal tetap dapat menghadapi keterbatasan pembangunan meskipun berada dekat dengan pusat pertumbuhan baru.

Kesenjangan wilayah di sekitar IKN menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan. Capello dan Cerisola (2022) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak selalu menghasilkan distribusi manfaat yang merata pada daerah sekitarnya. Dijkstra et al. (2023) menunjukkan bahwa perbedaan akses terhadap infrastruktur dan investasi dapat memunculkan variasi tingkat pembangunan antarwilayah. Faoziyah et al. (2025) mengemukakan bahwa perkembangan pusat pertumbuhan memiliki kemungkinan menghasilkan pola urbanisasi yang bersifat terpolarisasi.

Kesenjangan akses ekonomi juga dapat terjadi antara kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan memanfaatkan peluang pembangunan dan kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya. Prabowo dan Wiratama (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan dampak sosial memerlukan perhatian terhadap kelompok rentan. Muafiroh dan Tambunan (2025) menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan agar distribusi manfaat ekonomi dapat berlangsung lebih merata. Hudalah et

al. (2021) mengemukakan bahwa distribusi kekuasaan dalam pembangunan memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

Potensi eksklusi sosial menjadi isu yang sering muncul pada proyek pembangunan berskala besar. Silver (2021) menjelaskan bahwa proyek perkotaan strategis dapat menghasilkan perbedaan akses terhadap ruang dan sumber daya. Rijanta et al. (2025) menunjukkan adanya potensi perubahan penguasaan ruang yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Olijkan (2023) mencatat bahwa sebagian masyarakat di sekitar kawasan IKN memiliki kekhawatiran terhadap perubahan sosial yang berlangsung cepat.

Tantangan sosial dalam pembangunan IKN memerlukan pendekatan tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Mardianti et al. (2025) menjelaskan bahwa model *co-production* dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Nusantara. Rachmawati et al. (2023) menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan ibu kota baru. Fisher et al. (2024) mengemukakan bahwa keberlanjutan pembangunan Nusantara memerlukan keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses transformasi wilayah.

D. Kesimpulan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan bentuk intervensi pembangunan yang diarahkan untuk mengubah struktur keruangan nasional yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari perspektif keruangan, IKN berpotensi mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan konektivitas antarwilayah. Pergeseran aktivitas ekonomi ke luar Jawa berimplikasi pada perubahan distribusi kekuasaan ekonomi yang sebelumnya lebih terkonsentrasi pada wilayah metropolitan utama. Proses tersebut menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berkaitan dengan pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga berhubungan dengan upaya restrukturisasi pola pembangunan nasional dan distribusi sumber daya ekonomi antarwilayah.

Dari perspektif sistem sosial, pembangunan IKN memunculkan dinamika baru yang berkaitan dengan urbanisasi, mobilitas penduduk, perubahan mata pencaharian, serta interaksi sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Pembangunan ini menghadirkan peluang ekonomi baru bagi wilayah Kalimantan dan kawasan sekitarnya, sekaligus menimbulkan tantangan berupa potensi ketimpangan sosial-spasial, perubahan penguasaan ruang, dan kebutuhan akan tata kelola yang inklusif. Efektivitas pembangunan IKN dalam mendorong pemerataan

pembangunan dan redistribusi kekuasaan ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan sehingga manfaat pembangunan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat dan wilayah secara lebih proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anirwan, A., Aljurida, A. M. A., et al. (2024). Developing a new capital city (IKN) in Indonesia: A thematic analysis. *Policy & Governance Review*.
- Capello, R., & Cerisola, S. (2022). Regional growth and territorial cohesion. *The Annals of Regional Science*.
- Dannenbergh, P., & Kulke, E. (2022). Economic geography and regional development in emerging economies. *Geographische Zeitschrift*.
- Dijkstra, L., Poelman, H., & Rodríguez-Pose, A. (2023). The geography of EU discontent and regional inequality. *Regional Studies*.
- Faoziyah, U., Firman, T., & Fahmi, F. Z. (2025). Polarised or depolarised urbanisation? Cities and growth centres development in Indonesia. *Urban Policy and Research*.
- Firman, T. (2022). Regional development and metropolitan transformation in Indonesia. *Urban Studies*.
- Firman, T., Fahmi, F. Z., & Hudalah, D. (2023). Urbanisation and spatial inequality in Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*.
- Fisher, M., Longman, R. J., Maryudi, A., & Laraswati, D. (2024). Nusantara: Climate dilemmas of a green capital city in Indonesia.
- Gunawan, I. K. (2024). Ethnic fractionalization, ethnic polarization, and potential conflict in parent districts of IKN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Hudalah, D., Winarso, H., & Firman, T. (2021). Planning, power and urban development in Indonesia. *Urban Studies*.
- Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., & Storper, M. (2023). Regional inequality and economic development: Theories and policies. *Journal of Economic Geography*.
- Istiqomah, E. W., Sumadio, W., Ramdhan, M., & Yulius, Y. (2025). Spatial transformation and toponomastic dynamics in Indonesia's Nusantara capital. *GeoJournal*.
- Kalalinggi, R., Hisdar, M., Sarmiasih, M., et al. (2023). Forecasting the development of IKN (new national capital) in sustainable development, Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*.
- Lang, T., & Görmär, F. (2023). Regional development in peripheral areas. *European Planning Studies*.
- Mardianti, E., Al Ghofiqi, M. D., Suaedi, F., & Setijaningrum, E. (2025). Reshaping

- governance: Mainstreaming co-production in the megaproject development of Nusantara capital city, Indonesia. *Journal of Public Policy*.
- Moser, S. (2022). New capitals and nation building in the Global South. *Geoforum*.
- Muafiroh, S., & Tambunan, R. P. (2025). Systematic study of political ecology and the role of local community in the development of the Ibu Kota Nusantara. *Sustainable Urban Development*.
- Olijkan, S. (2023). Facing the unknown: Perspectives and experiences of Sepaku villagers on Indonesia's capital relocation.
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2023). Local and regional development in times of economic transformation. *Regional Studies*.
- Prabowo, T. B., & Wiratama, D. O. (2025). Impact management strategies in the development of the national capital on local communities. *Scientific Development Journal*.
- Rachmawati, R., Kumorotomo, W., et al. (2025). The new capital city of Indonesia: Social polarisation or social cohesion in Nusantara? *Human Geographies*.
- Rachmawati, R., Rohmah, A. A., et al. (2023). Smart city development in "Nusantara", the new capital of Indonesia: Local government and community readiness. *Human Geographies*.
- Rahayu, F., Hasyim, M., & Arifin, B. (2025). Uncovering missing environmental narratives in the planning of Nusantara, Indonesia. *Town and Regional Planning*.
- Rijanta, R., Wibisono, H., Saputra, E., et al. (2025). Frontier urbanisation in East Kalimantan: Displacement, livelihood shifts, and contested development in Indonesia's new capital. *Journal of Rural and Regional Development*.
- Rodríguez-Pose, A. (2022). The rise of places that don't matter. *Regional Studies*.
- Rozi, S., Setiawan, O. T., & Anyasfika, F. (2025). Capital city relocation: A comparison of the social impacts of Putrajaya Malaysia and Nusantara Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas*.
- Santoso, T. I., & Alamsyah, M. N. (2025). Netnographic analysis of Twitter user behavior on the relocation of Indonesia's capital to Nusantara.
- Silver, C. (2021). State power and urban megaprojects in Southeast Asia. *Cities*.
- Storper, M. (2022). Regional development theory and spatial inequality. *Regional Studies*.
- Turok, I., & McCann, P. (2023). Regional development, agglomeration, and inclusive growth. *Regional Studies*.
- Tela, I. A., & Yu, Z. (2025). Examining the global perception of nickel

mining environmental impact: A case study of China–Indonesia public opinion on Earth’s sustainability. In *Proceedings of the International Conference on Sustainability and Global Studies (ICSGS 2024)*. Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icsgs-24/126008167>

Warburton, E. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 19, 101538.
<https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101538>